

ANALISIS DETERMINAN TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI SUMATRA UTARA TAHUN 2015-2020

Fitria Dita Pramesti^{*1}, Yuni Prihadi Utomo²

^{1,2}Prodi Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

*Corresponding Author:

Email: B300190083@student.ums.ac.id

Abstract.

The condition of regional poverty reflects the level of prosperity of the population living in the region. This study aims to determine the direction and magnitude of the influence of population density, open unemployment rate, minimum wage, government spending, the proportion of GRDP in the industrial sector on poverty in North Sumatra during the 2015-2020 time period. This type of research is a quantitative research using secondary data. The data analysis technique used is panel data regression analysis with the Fixed Effect Model (FEM) approach. The results of the study show that the District/City Minimum Wage and the Proportion of GRDP in the Industrial Sector have an influence on Poverty. Meanwhile, Population Density (KPPD), Open Unemployment Rate (UEMP), and Government Expenditure (GOV) have no influence on Poverty in North Sumatra. Meanwhile the highest number of poverty was identified in Medan City. The Minimum Wage responds to the decline in the number of poor people. An increase in the minimum wage means that the income of workers also increases, which in turn will have an impact on increasing people's purchasing power or consumption. According to the efficiency-wage theory, it shows that worker productivity increases along with the wage level. The proportion of GRDP in the industrial sector has an influence on the Poverty Level. According to the theory of the trickle down effect which explains that economic growth calculated on the basis of GRDP can have a positive impact on reducing poverty, if ongoing economic growth encourages the poor.

Keywords: Poverty, Wages, Population Density, Government Expenditure, GRDP

1. PENDAHULUAN

Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan adalah ketidakmampuan memenuhi standar dasar yang meliputi kebutuhan seperti makan maupun non makan. Kemiskinan merupakan permasalahan setiap negara, khususnya bagi negara yang berkembang, pengentasan kemiskinan merupakan tujuan akhir suatu negara. Kemiskinan merupakan sebuah permasalahan yang belum bisa diselesaikan di Negara Indonesia khususnya di Provinsi Sumatra Utara ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan, beberapa diantaranya adalah jumlah penduduk, tingkat pengangguran, upah minimum, pengeluaran pemerintah dan proporsi PDRB sektor industri. Kemiskinan merupakan persoalan individu masyarakat yang sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dikarenakan rendahnya upah minimum yang tidak sesuai dengan biaya hidup, serta meningkatnya kepadatan penduduk, sehingga akan mempengaruhi daya saing dalam berbagai sektor kebutuhan khususnya pada mendapatkan pekerjaan yang berakibat banyaknya tingkat pengangguran (Sari, 2021).

Kemiskinan merupakan masalah utama bagi negara berkembang karena negara memiliki berbagai pandangan tentang ekonomi, sosial, politik dan sebagainya. kemiskinan merupakan suatu kondisi yang

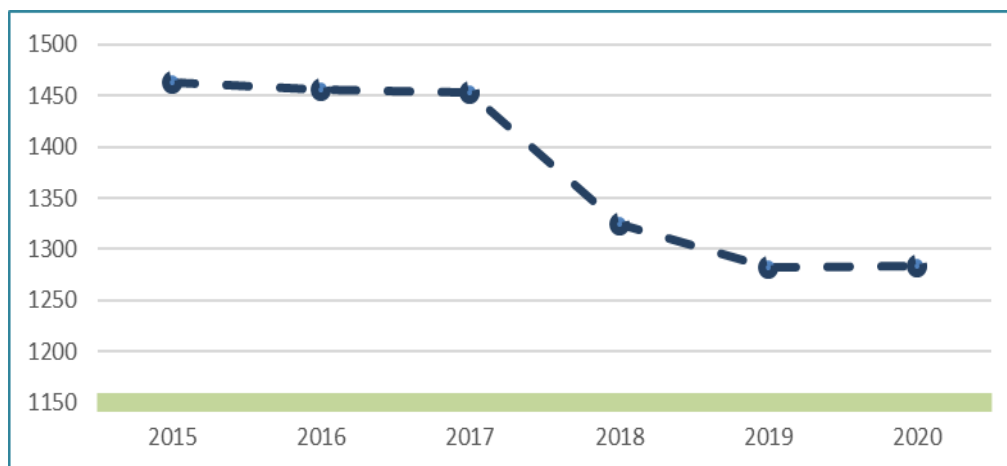
sering dikaitkan dengan kebutuhan, kekurangan dan kesulitan berbagai kondisi suatu kehidupan yang mengakibatkan seseorang menjadi gagal dalam memenuhi kebutuhannya (Prasada et al., 2020).

Kemiskinan merupakan masalah yang muncul sejak pra reformasi hingga masa sekarang. Hal ini yang menjadikan munculnya relevitas kemiskinan di Indonesia sebagai bentuk permasalahan yang paling signifikan dan dominan dihadapi oleh kebijakan pemerintah saat ini. Semua kebijakan yang turun dari pemerintah yang bertujuan untuk mengatasi kemiskinan, relevitas kemiskinan selalu diidentikan sebagai masalah utama karena belum tercapainya kesejahteraan yang maksimal (Desmawan et al., 2021).

World Bank menetapkan standar kemiskinan berdasarkan pendapatan per kapita, yaitu penduduk yang pendapatan per kapitanya kurang dari sepertiga rata-rata pendapatan perkapita nasional. Dalam konteks tersebut, maka ukuran kemiskinan menurut *World Bank* adalah USD \$2 per orang per hari. Oleh sebab itu, menurut Kuncoro dalam Annur (2013), garis kemiskinan yang didasarkan pada konsumsi terdiri dari dua elemen, yaitu: 1) pengeluaran yang diperlukan untuk memberi standar gizi minimum dan kebutuhan mendasar lainnya; dan 2) jumlah kebutuhan yang sangat bervariasi yang mencerminkan biaya partisipasi dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan data BPS secara umum persentase penduduk miskin di Provinsi Sumatra Utara selama periode 2015-2020 mengalami penurunan secara bertahap. Grafik 1 memperlihatkan persentase penduduk miskin Provinsi Sumatra Utara tahun 2015 hingga 2020.

Grafik 1
Persentase Penduduk Miskin Provinsi Sumatra Utara Tahun 2015-2020



Sumber: BPS, diolah

Berdasarkan Grafik 1 dapat dilihat bahwa tingkat penduduk miskin pada Provinsi Sumatra Utara pada tahun 2015-2020 cenderung mengalami penurunan secara bertahap dari tahun ke tahun. Yang dimulai pada tahun 2015 sampai tahun 2017 menunjukkan penduduk miskin masih tinggi dengan rata-rata 1.450 jiwa, pada saat tahun 2018 penduduk miskin mengalami penurunan dari 1.450 jiwa menjadi 1.300 jiwa, pada tahun 2019 dan 2020 menunjukkan grafik mengalami penurunan yang tidak jauh dari tahun 2018 yaitu penduduk miskin mencapai 1250 jiwa. Hal tersebut mengakibatkan menurunnya tingkat pengangguran dan meningkatnya upah minimum karena masyarakatnya sudah dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, pengeluaran pemerintah juga membantu menurunkannya persentase kemiskinan. Dengan adanya bantuan berupa KPM (Keluarga Penerima Manfaat) bagi keluarga yang tidak mampu.

Todaro dan Smith dalam Ramdani (2015), menjelaskan tinggi rendahnya tingkat kemiskinan di suatu negara tergantung pada dua faktor utama, yaitu tingkat pendapatan nasional rata-rata dan tingkat kesenjangan distribusi pendapatan. Setinggi apapun tingkat pendapatan perkapita yang dicapai oleh suatu negara, selama distribusi pendapatannya tidak merata, maka tingkat kemiskinan di negara tersebut pasti akan tetap parah. Demikian pula sebaliknya, semerata apapun distribusi pendapatan di suatu negara, jika rata-rata tingkat pendapatan perkapita rendah, maka kemiskinan juga akan semakin luas.

Arsyad dalam Rini & Sugiharti (2016), menyatakan bahwa kemiskinan dapat terjadi karena anggota masyarakat tidak atau belum berpartisipasi dalam proses perubahan yang disebabkan ketidakmampuan dalam kepemilikan faktor produksi atau kualitas yang kurang memadai. Kemiskinan dapat dipilah menjadi dua aspek, yaitu aspek primer dan aspek sekunder. Aspek primer berupa miskin aset (harta), organisasi sosial politik, pengetahuan, dan keterampilan. Sementara aspek sekunder berupa miskin terhadap jaringan sosial, sumber-sumber keuangan dan informasi.

Amartya Sen dalam Aidha et al., (2020) menjelaskan konsep kemiskinan dengan pendekatan kapabilitas (*capability approach*), yakni seseorang dikatakan miskin bila seseorang tersebut mengalami kekurangan kebebasan yang substantif (kesempatan dan rasa aman). Sehingga dirinya tidak memiliki kemampuan untuk menjadi sesuatu atau melakukan sesuatu yang dianggap bernilai.

Berdasarkan latar belakang di muka, penelitian ini akan mengamati arah dan besarnya pengaruh kepadatan penduduk, tingkat pengangguran terbuka, upah minimum, pengeluaran pemerintah, proporsi PDRB pada sektor industri terhadap kemiskinan di Sumatra Utara selama periode waktu 2015-2020.

II. KAJIAN PUSTAKA

Hidayat (2017), memakai analisis *Ordinary Least Square* (OLS), pada data Indonesia selama periode 2003-2010, menemukan pendidikan berpengaruh positif terhadap kemiskinan dengan koefisien regresi 0,271 dan signifikan empirik (p) t sebesar 0,072 ($<0,10$). Sementara itu konsumsi dan IPM berpengaruh negatif terhadap kemiskinan dengan koefisien regresi sebesar -2,972 dan -1,071 serta signifikan empirik (p) t sebesar 0,032 ($<0,10$) dan 0,017 ($<0,10$). Inflasi dan pendapatan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan dengan signifikan empirik (p) t sebesar 0,39 ($>0,10$) dan 0,453 ($>0,10$).

Ristika et al. (2021), memakai analisis *Ordinary Least Square* (OLS), pada data Provinsi Jawa Timur 2015-2019, menemukan jumlah penduduk, IPM dan tingkat pengangguran terbuka berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan dengan koefisien regresi -15,70, 5,060 dan 0,054 dengan signifikan empirik (p) t sebesar 0,000 ($<0,05$), 0,000 ($<0,05$) dan 0,054 ($<0,10$).

Alifah et al. (2020), pada provinsi Sumatra Utara selama periode 2016-2019 dengan menggunakan analisis regresi data panel dengan model terpilih adalah *Fixed Effect Model* (FEM) menemukan pendidikan dan PKH berpengaruh terhadap kemiskinan dengan koefisien regresi -2,156314 dan -0,132636 serta signifikan (p) empirik masing-masing 0,0187 ($<0,05$) dan 0,000 (0,01). Sementara jumlah penduduk, pengangguran, pengeluaran perkapita tidak berpengaruh dengan masing-masing -0,01034, 0,003653 dan -0,132636 serta signifikan (p) empirik 0,7273 ($>0,10$), 0,4908 ($>0,10$) dan 0,7369 ($>0,10$).

Ramdani (2013), memakai analisis regresi *Ordinary Least Square* (OLS), pada data Indonesia selama periode 2003-2010, menemukan pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran dan pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan dengan koefisien regresi -1,09 dan 1,13 dan signifikan empirik (p) 0,00 ($<0,01$), 0,000 ($<0,01$). Sementara pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan dengan koefisien regresi -0,00 dan signifikan empirik 0,038 ($>0,05$). pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin.

Selama periode 2014-2016 di Indonesia Handalani (2019), dengan menggunakan analisis regresi *Ordinary Least Square* (OLS), menemukan kepadatan penduduk, PDRB pada harga konstan, upah

minimum regional berpengaruh terhadap penduduk miskin dengan koefisien regresi 33,32806, -0,190891, 3.20006, -0,000492 dan signifikan empirik t 0,0036(<0,01), 0,0001(<0,01), 0,000(<0,01), 0,04(<0,05).

Selama tahun 2018-2021, di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nalle et al. (2022), dengan menggunakan analisis regresi data panel dengan model terpilih *Fixed Effect Model* (FEM) menemukan indeks pembangunan berpengaruh terhadap kemiskinan dengan koefisien 0,625411 signifikan empirik 0,0696 (<0,10). Jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kemiskinan dengan masing-masing koefisien 3.051006, -0,062185 signifikan empirik 0,2892(>0,10), 0,3309(>0,10).

Wulandari & Aisyah (2021), selama tahun 2011 sampai 2019 di Provinsi Jawa dan Bali memakai analisis data panel dengan model terpilih adalah *Fixed Effect Model* (FEM), menemukan tingkat pengangguran, PDRB dan jumlah pemakaian listrik berpengaruh terhadap kemiskinan dengan nilai koefisien 4,385120, 2,262832 dan -3,094774 dengan empirik t 0,0001(<0,01), 0,0278 (<0,05) dan 0,00032 (<0,01). Sementara IPM tidak berpengaruh terhadap kemiskinan dengan nilai koefisien -1,3747 dan signifikan empirik t 0,1751(>0,10).

Prasada et al. (2020) dengan menggunakan analisis *Ordinary Least Square* (OLS), di provinsi Jawa, menemukan tingkat kemiskinan, tingkat inflasi, indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran terbuka, upah minimum regional berpengaruh terhadap determinan kemiskinan, masing-masing koefisien regresi -7,1842, -1,9132, -3,8159, -4,8283, -1,9783 dan signifikan empirik t sebesar 0,0000(<0,01), 0,0279 (<0,05), 0,001(<0,01), 0,000(<0,01), 0,0239(<0,05).

Di Indonesia tahun 2015-2019, Muhammad et al. (2022) dengan menggunakan analisis regresi data panel dengan model terpilih *Fixed Effect Model* (FEM), menemukan inflasi berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan dengan koefisien 0,000870 dan signifikan empirik t -0,0216 (<0,05). Sementara investasi, pertumbuhan ekonomi, dana saldo, dana desa, infrastruktur tidak berpengaruh terhadap kemiskinan dengan koefisien masing-masing regresi -0,00357, -0,000543, 6,6005, 2,81005, 3,81005 dengan signifikan empirik t 0,5324(>0,10), 0,1894 (>0,10), 0,6556(>0,10), 0,2297(>0,10), 0,9662(<0,10).

Selama periode 2015-2018 di Provinsi Jawa Barat Fiskal & Wardani (2020) dengan menggunakan analisis regresi *Ordinary Least Square* (OLS), menemukan bahwa indeks pembangunan manusia, pertumbuhan populasi, domestik regional bruto berpengaruh terhadap kemiskinan dengan koefisien -0,085436, -0,2854, -0,42005 dan signifikan empirik t 0,000(<0,01), 0,03566(<0,05), 0,02377(<0,05).

Selama tahun 2015-2019 di ASEAN, dengan menggunakan analisis data panel dengan model terpilih *Fixed Effect Model* (FEM), variabel rasio area uang, likuiditas ekonomi, pertumbuhan ekonomi dan persentase gross produk domestik tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan dengan koefisien 0,045932, -0,037890, 0,079551, 0,031258 dan signifikan empirik t 0,6480(<0,10), 0,3823(<0,10), 0,7984(<0,10), 0,8949(<0,10). Rahayu et al. (2021)

Andriaswati & Utami (2022), dengan menggunakan analisis data panel dengan model terpilih *Random Effect Model* (REM), di Provinsi Papua pada tahun 2011 hingga 2019 menemukan variabel dana perimbangan dan pendidikan berpengaruh terhadap kemiskinan dengan masing-masing koefisien -5,95512, -2,626040, serta signifikan empirik 0,000(<0,01), 0,000(<0,01). Sementara variabel pertumbuhan ekonomi, belanja modal dan kesehatan tidak berpengaruh pada tingkat kemiskinan dengan signifikan empirik 0,1188(>0,10), 0,8168(>0,10) dan 0,3605(>0,10).

Sakinah & Pudjianto (2018), menggunakan analisis data panel dengan model terpilih *Fixed Effect Model* (FEM), di wilayah metropolitan Jawa Timur tahun 2010 hingga 2016 menemukan inflasi, kesehatan, kesempatan kerja dan pendidikan ketenagakerjaan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan metropolitan Jawa Timur dengan koefisien regresi -0,002107 dan -0,015481 serta signifikan empirik 0,496 (<0,10), 0,003 (<0,05), -0,002 (<0,01) dan 0,003(<0,05).

Lilik Andrietya et al. (2020), menggunakan analisis regresi data panel dengan model terpilih *Fixed Effect Model* (FEM) di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013 hingga 2018, menemukan IPM, PDRB, tingkat pengangguran, investasi berpengaruh terhadap kemiskinan dengan koefisien 5,5716, -3,5110, -51660, -3,5600 dengan signigikan empirik 0,000(<0,01), 0,000 (<0,01), 0,000 (<0,01), 0,000 (0,01). Sementara dummy tidak signifikan dengan tingkat signifikan 0,7855 (>0,10).

Di Provinsi Banten selama periode 2016-2020, memakai analisis regresi data panel dengan model terpilih *Fixed Effect Model* (FEM), menemukan UNEM dan HC berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan dengan masing-masing nilai koefisien 0,158613 dan -0,118703 dengan signifikan empirik 0,0000 (<0,01), -0,0456 (<0,01). Sementara variabel GR tidak berpengaruh terhadap kemiskinan dengan signifikan empirik 0,5522 (>0,10). Desmawan et al. (2021)

III. METODE

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis data panel dengan model ekonometrik sebagai berikut:

$$POV_{it} = \beta_0 + \beta_1 KPPD_{it} + \beta_2 UEMP_{it} + \beta_3 UMK_{it} + \beta_4 GOV_{it} + \beta_5 PPDRBI_{it} + e_{it}$$

Di mana:

POV	= Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)
β_0	= Konstanta
$\beta_1 \beta_2 \beta_3 \beta_4 \beta_5$	= Koefisien Variabel Independen
$KPPD$	= Kepadatan Penduduk (Jiwa)
$UEMP$	= Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
UMK	= Upah Minimum Provinsi Sumatra Utara(rupiah)
GOV	= Pengeluaran Pemerintah (rupiah)
$PPDRBI$	= Proporsi PDRB Sektor Industri (%)
i	= Kabupaten / Kota ke i Provinsi Sumatra Utara
t	= Tahun ke t
e	= <i>error term</i>

Model ekonometrik di atas merupakan kombinasi dari model Ramdani (2013), Wulandari dan Aisyah (2021) dan Handalani (2019). Tingkat Pengangguran (UEMP), Kepadatan Penduduk (KPPD), Upah Minimum (UMK) dan PDRB sektor industri (PPDRBI) diduga memiliki pengaruh positif terhadap kemiskinan, sedangkan Pengeluaran Pemerintah diduga berpengaruh negatif terhadap kemiskinan.

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data panel yaitu kombinasi dari *time series* dan *cross section*. Data *time series* dari tahun 2015-2020, sedangkan data *cross section* yang digunakan adalah data 33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatra Utara. Data yang dipakai diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data yang digunakan meliputi Kepadatan Penduduk (KPPD), Tingkat Pengangguran Terbuka (UEMP), Upah Minimum (UMK), Pengeluaran Pemerintah (GOV), Proporsi PDRB Sektor Industri (PPDRBI).

Tahap estimasi analisis regresi data panel akan meliputi estimasi parameter model ekonometrik dengan pendekatan *Pooled Least Square* (PLS), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM); pemilihan model terestimasi terbaik dengan uji Chow dan uji Hausman dan jika diperlukan menggunakan uji Lagrange Multiplier; uji kebaikan model terestimasi terpilih; dan uji validitas pengaruh variabel independen pada model terestimasi terpilih.

IV. HASIL PENELITIAN

Hasil estimasi model ekonometrik di muka dengan pendekatan *Pooled Least Square* (PLS), *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM) beserta hasil uji pemilihan modelnya terangkum pada Tabel 1.

Tabel 1
Hasil Estimasi Model Ekonometrik Regresi Data Panel - Cross section

Variabel	Koefisien Regresi		
	PLS	FEM	REM
<i>C</i>	-677,9589	218,0303	197,1865
<i>Log (KPPD)</i>	3,185378	8,806395	5,835975
<i>UEMP</i>	0,519475	-0,092613	-0,070606
<i>Log (UMK)</i>	-37,71298	-18,05710	-18,71995
<i>Log (GOV)</i>	59,82490	1,245270	3,669751
<i>PPDRBI</i>	0,168950	0,995378	0,709871
R^2	0,705130	0,994453	0,350429
<i>Adjusted R²</i>	0,697370	0,993154	0,333335
Statistik <i>F</i>	90,87030	765,5547	20,50018
Prob. Statistik <i>F</i>	0,000000	0,000000	0,000000
Uji Pemilihan Model			
(1) Chow			
Cross-section $F(32, 158) = 778,760099$; Prob. $F(32, 158) = 0,0000$			
(2) Hausman			
Cross section random $\chi^2(5) = 76,200968$; Prob. $\chi^2(5) = 0,0000$			

Sumber: BPS, diolah.

Uji Chow dan uji Hausman memperlihatkan bahwa (*FEM*) terpilih sebagai model terestimasi terbaik, terlihat dari probabilitas atau signifikansi empirik statistik *F* dan statistik χ^2 yang keduanya bernilai 0,0000 (< 0,01). Hasil estimasi lengkap dari model terestimasi *FEM*, terlihat pada Tabel 2 dan Tabel 3.

Tabel 2
Model Estimasi Fixed Effect Model (FEM)

$\widehat{POV}_{it} = 218,0303 + 8,806395 \log(KPPD)_{it} - 0,092613 UEMP_{it} -$			
	(0,3681)		(0,6799)
$18,05710 \log(UMK)_{it} + 1,245270 \log(GOV)_{it} + 0,995378 PPDRBI_{it}$			
	(0,0000)*	(0,3910)	(0,0869)***
$R^2 = 0,994453$; $DW = 0,807097$; $F = 765,5547$; Prob. $F = 0,0000$			

Sumber: BPS, diolah. Keterangan: *Signifikan pada $\alpha = 0,01$; **Signifikan pada $\alpha = 0,05$; ***Signifikan pada $\alpha = 0,10$; Angka di dalam kurung adalah probabilitas nilai statistik t.

Tabel 3
Efek dan Konstanta Wilayah

No	Wilayah	Efek	Konstanta
1	Nias	4,555984	222,5863
2	Mandailing Natal	16,15506	234,1854
3	Tapanuli Selatan	7,484672	225,5150
4	Tapanuli Tengah	14,60958	232,6399
5	Tapanuli Utara	9,123165	227,1535
6	Toba Samosir	-12,89850	205,1318
7	Labuhan Batu	-19,01006	199,0202
8	Asahan	28,57294	246,6032
9	Simalungun	44,35573	262,3860
10	Dairi	-2,058864	215,9714
11	Karo	9,627204	227,6575
12	Deli Serdang	22,05229	240,0826
13	Langkat	68,12357	286,1539
14	Nias Selatan	28,04540	246,0757
15	Humbang Hasundutan	-3,856426	214,1739
16	Pakpak Bharat	-8,974872	209,0554
17	Samosir	0,094034	218,1243
18	Serdang Bedagai	4,499403	222,5297
19	Batu Bara	-26,83133	191,1990
20	Padang Lawas Utara	-8,766092	209,2642
21	Padang Lawas	-10,23643	207,7939
22	Labuhanbatu Selatan	-27,14089	190,8894
23	Labuanbatu Utara	-10,75590	207,2744
24	Nias Utara	15,68050	233,7108
25	Nias Barat	-3,148194	214,8821
26	Sibolga	-37,74247	180,2878
27	Tanjungbalai	-37,51762	180,5127
28	Pematangsiantar	-53,21919	164,8111
29	Tebing Tinggi	-50,58810	167,4422
30	Medan	122,3222	340,3525
31	Binjai	-48,49434	169,5360
32	Padangsidempuan	-32,99366	185,0366
33	Gunungsitoli	-6,458701	211,5716

Sumber: BPS, diolah

Dari Tabel 2 terlihat model terestimasi *FEM* eksis dengan probabilitas atau signifikansi empirik statistik *F* bernilai 0,0000 ($<0,01$), dengan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,9944; yang menunjukkan model terestimasi *FEM* memiliki daya ramal yang sangat tinggi. Namun demikian, daya ramal ini harus dimaknai secara kritis, karena secara terpisah dari lima variabel dalam model ekonometrik, ternyata hanya dua variabel saja yakni variabel Upah Minimum (UMK) dan Proporsi PDRB Sektor Industri (PPDRBI) yang memiliki pengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan (POV) dengan probabilitas atau signifikansi empirik statistik *t* masing-masing sebesar 0,0000 ($<0,01$) dan 0,0869 ($<0,10$).

Variabel Upah Minimum memiliki nilai koefisien regresi sebesar -18,05710, dengan pola hubungan linier-logaritma. Artinya, apabila Upah Minimum mengalami kenaikan sebesar 1%, maka Tingkat

Kemiskinan akan mengalami penurunan sebesar 0,1805 ribu jiwa. Sebaiknya, jika Upah Minimum mengalami penurunan sebesar 1%, maka Tingkat Kemiskinan akan naik sebesar 0,1805 ribu jiwa.

Variabel Proporsi PDRB Sektor Industri memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,995378, dengan pola hubungan linier-linier. Artinya, apabila Proporsi PDRB Sektor Industri mengalami kenaikan sebesar 1%, maka Tingkat Kemiskinan akan mengalami kenaikan sebesar 0,9953 ribu jiwa. Sebaiknya, jika Proporsi PDRB Sektor Industri mengalami penurunan sebesar 1%, maka Tingkat Kemiskinan akan turun sebesar 0,9953 ribu jiwa.

Pada Tabel 3 terlihat bahwa daerah dengan nilai konstanta tertinggi adalah Kota Medan, yakni sebesar 340,3525. Artinya, terkait dengan pengaruh variabel Kepadatan Penduduk, Tingkat Pengangguran Terbuka, Upah Minimum, Pengeluaran Pemerintah, dan Proporsi PDRB Sektor Industri di Provinsi Sumatra Utara cenderung memiliki Jumlah Penduduk Miskin yang lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Sumatra Utara. Setelah Kota Medan, dua Kabupaten dengan konstanta terbesar adalah Kabupaten Langkat dan Kabupaten Simalungun.

Nilai konstanta terendah dimiliki oleh Kabupaten Pematangsiantar, yaitu sebesar 164,8111. Artinya, terkait dengan pengaruh variabel Kepadatan Penduduk, Tingkat Pengangguran Terbuka, Upah Minimum, Pengeluaran Pemerintah, dan Proporsi PDRB Sektor Industri di Provinsi Sumatra Utara cenderung memiliki Jumlah Penduduk Miskin cukup rendah dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya. Setelah Kabupaten Pematangsiantar, dua Kabupaten dengan konstanta terendah adalah Kabupaten Tebing Tinggi dan Kabupaten Binjai.

Tingkat Kemiskinan di berbagai Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatra Utara selama periode tahun 2015-2020 ternyata dipengaruhi oleh Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Proporsi PDRB Sektor Industri. Sementara itu, Kepadatan Penduduk (KPPD), Tingkat Pengangguran Terbuka (UEMP), dan Pengeluaran Pemerintah (GOV) tidak memiliki pengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan di Sumatra Utara.

Kepadatan Penduduk tidak memiliki pengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Pertambahan penduduk menimbulkan masalah ekonomi, sosiologis dan psikologis yang erat kaitannya dengan keterbelakangan dan juga menghambat kesempatan untuk hidup yang lebih baik. Atas dasar itu, pertumbuhan penduduk yang tinggi akan meningkatkan jumlah tingkat kemiskinan. Namun berbeda dengan penelitian ini, bahwa jumlah pertumbuhan penduduk tidak memberikan efek yang signifikan dikarenakan peningkatan kepadatan penduduk berjalan seiring dengan peningkatan jumlah penduduk yang bekerja dan kesempatan kerja relatif meningkat. Sehingga kondisi tersebut menyebabkan tekanan pada laju kemiskinan. Dengan demikian, peningkatan kepadatan penduduk tidak mempengaruhi kegiatan ekonomi dan kemiskinan di Sumatera Utara.

Tingkat Pengangguran Terbuka ditemukan tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Pengangguran tidak berarti bahwa mereka tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Situasi tersebut dikarenakan pengangguran terjadi bukan dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (atau dari kelompok dengan pendapatan sedikit di atas garis kemiskinan), melainkan dari masyarakat yang merasa tidak cocok dengan jenis pekerjaan yang ada, mereka mengharapkan pekerjaan yang lebih baik. Hal tersebut mereka lakukan karena mereka mempunyai sumber pendapatan lain yang mampu memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian, peningkatan angka pengangguran ini tidak mempengaruhi angka kemiskinan.

Upah Minimum memiliki pengaruh negatif terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Artinya, kenaikan upah akan menyebabkan penurunan jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara. Upah minimum merupakan masalah pembangunan di tingkat kemiskinan dalam keterbatasan, ketidakmampuan, dan kekurangan. Dalam pasar tenaga kerja sangat penting untuk menetapkan besarnya upah yang harus dibayarkan. Peningkatan upah minimum dapat meningkatkan rata-rata upah pekerja sehingga meningkatkan pendapatan, terutama bagi pekerja berpenghasilan rendah, yang dalam gilirannya

akan menaikkan kualitas hidup dan meningkatkan taraf hidup mereka. Dengan demikian mengangkat mereka dari kemiskinan.

Pengeluaran Pemerintah tidak memberikan pengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Hal ini memperlihatkan bahwa alokasi pengeluaran pemerintah di Provinsi Sumatera Utara belum mampu mengurangi angka kemiskinan. Salah satu penyebabnya adalah karena masih rendahnya pengeluaran pemerintah di sektor publik terutama, di bidang pendidikan dan kesehatan. Pengentasan kemiskinan tidak dapat dicapai kecuali pengeluaran pemerintah diarahkan untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia.

Proporsi PDRB Sektor Industri ditemukan memberikan pengaruh positif terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. PDRB sektor industri suatu wilayah yang tinggi menandakan wilayah tersebut memiliki perekonomian yang baik. Namun dilain sisi, pertumbuhan yang tidak merata akan menyebabkan ketimpangan. Sehingga pertumbuhan ekonomi belum mampu menurunkan kemiskinan secara signifikan karena pola pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara yaitu ketimpangan. Pertumbuhan tidak hanya terjadi pada tingkat yang lebih lambat, tetapi juga menjadi semakin tidak merata. Dengan demikian, jumlah penduduk miskin tidak akan berkurang secara signifikan tanpa adanya pertumbuhan ekonomi yang menguntungkan penduduk miskin.

V. KESIMPULAN

Fixed Effect Model (FEM) terpilih sebagai model terestimasi terbaik. Model terestimasi ini eksis dengan R^2 sebesar 0,9944. Secara terpisah Upah Minimum (UMK) dan Proporsi PDRB Sektor Industri (PPDRBI) berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan. Sedangkan Kepadatan Penduduk (KPPD), Tingkat Pengangguran Terbuka (UEMP), dan Pengeluaran Pemerintah (GOV) tidak memiliki pengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan di Sumatra Utara.

Upah Minimum memberikan pengaruh negatif terhadap Tingkat Kemiskinan, menunjukkan bahwa upah minimum mampu memberikan respon pada penurunan jumlah penduduk miskin. Meningkatnya upah minimum berarti bahwa pendapatan dari pekerja juga mengalami peningkatan. Pendapatan meningkat selanjutnya akan berdampak pada meningkatnya daya beli atau konsumsi masyarakat. Menurut teori upah-efisiensi (*efficiency-wage*) menunjukkan bahwa upah yang banyak membuat aktivis semakin menguntungkan. Teori efisiensi upah menunjukkan bahwa produktivitas pekerja semakin tinggi bersamaan dengan tingkat upah. Proporsi PDRB sektor industri memberikan pengaruh positif terhadap Tingkat Kemiskinan. Secara ekonomi, PDRB ialah indikator untuk membuktikan kesuksesan pembangunan. Menurut teori *trickle down effect* yang menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dihitung berdasarkan PDRB bisa berakibat positif terhadap penurunan kemiskinan, jika pertumbuhan ekonomi yang berlangsung mendorong penduduk miskin.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara diharapkan dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai bahan dalam mempertimbangkan langkah-langkah untuk mendukung pengentasan kemiskinan. Pemerintah diharapkan menaikkan upah sesuai dengan KHL (Kebutuhan Hidup Layak) untuk melindungi pekerja. Harapannya, dengan adanya upah minimum di daerah tersebut, pendapatan Sumatera Utara meningkat dan mampu melindungi pekerjaanya dari kemiskinan. Pada saat yang sama, pemerataan pembangunan industri lebih ditingkatkan, sehingga peningkatan PDRB industri lebih dirasakan di kalangan masyarakat miskin. Pemerataan proporsi PDRB sektor industri yang merata menciptakan pertumbuhan ekonomi yang seimbang sehingga kemiskinan bisa teratasi dengan baik. Kemudian diharapkan peneliti selanjutnya yang sejenis dapat menambahkan variabel lain untuk mengukur kemiskinan di provinsi Sumatera Utara, sehingga permasalahan kemiskinan dapat dianalisis lebih mendalam dan dapat ditemukan solusi lain untuk menyelesaikannya.

REFERENSI

- Aidha, C. N., Ningrum, D. R., Armintasari, F., Herawati, Ramdhaningrum, H., Sagala, M., Thariq, R. M., & Kartika, W. (2020). Indeks Kemiskinan Multidimensi Indonesia 2015-2018. In *Perkumpulan PRAKARSA*.
- Alifah, A., Yozza, H., & Asdi, Y. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan di Kota/Kabupaten Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Matematika UNAND*, IX(1), 53–61.
- Andriaswati¹, E., & Utami², S. (2022). Determinants of Poverty Rates in Papua Province in 2011 - 2019. *Efficient: Indonesian Journal of Development Economics*, 5(1), 1453–1467. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/efficient/article/view/50928>
- Annur, R. A. (2013). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Kecamatan Jekulo Dan Mejobo Kabupaten Kudus Tahun 2013. *Economics Development Analysis Journal*, 2(4), 409–426.
- Desmawan, D., Syaifudin, R., Mamola, R. M., Haya, H., & Indriyani, D. (2021). Determinant Factors Poverty of Relativity in Banten Province: A Panel Data Analysis. *Ecoplan*, 4(2), 131–141. <https://doi.org/10.20527/ecoplan.v4i2.387>
- Fiskal, M. Y., & Wardani, D. T. K. (2020). Determinants of Poverty in West Java Province After the Regional Expansion of Pangandaran District. *Journal of Economics Research and Social Sciences*, 4(1). <https://doi.org/10.18196/jerss.040120>
- Handalani, R. T. (2019). Determinan Kemiskinan Daerah Provinsi Di Indonesia : Tinjauan Kebijakan Publik Determinant of Poverty in Indonesian ' S Province : *Borneo Administrator*, 15(1), 59–80.
- Lilik Andrietya, A., Pujiati, A., & Setyadharma, A. (2020). Determinants of Poverty in Central Java Province 2013-2018. *Journal of Economic Education*, 9(1), 81–88. <https://doi.org/10.15294/jeec.v9i1.38671>
- Muhammad, A., Walinono, I., Nohong, M., Munizu, M., Amytia, A., & Dwiyaniti, R. (2022). Ananalysis Of Determinants Of Poverty Rates In Indonesia. *Journal of Positive School Psychology*, 6(6), 8581–8595.
- Nalle, F. W., Seran, S., & Bria, F. (2022). Analisis Determinan Kemiskinan Propinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 13(2), 206–220. <https://doi.org/10.33059/jseb.v13i2.4962>
- Penggunaan, E., Produksi, F., Cabai, U., Sumowono, K., & Semarang, K. (2013). *Economics Development Analysis Journal*. 2(4), 446–455.
- Prasada, I. Y., Yulhar, T. F. M., & Rosa, T. A. (2020). Determinants of poverty rate in Java Island: Poverty alleviation policy. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 18(2), 95–104. <https://doi.org/10.29259/jep.v18i2.11664>
- Rahayu, S., Hastuti, B., & Udjianto, D. W. (2021). *Determinants of Poverty in ASEAN Countries*. 1(3), 110–114.
- Ramdani, M. (2015). Determinan Kemiskinan Di Indonesia Tahun 1982-2012. *Economics Development Analysis Journal*, 4(1), 58–64.
- Rian Hidayat. (2017). *Uin Syarif Hidayatullah Jakarta Uin Syarif Hidayatullah Jakarta*. 4(95), 1–28. [http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/33026/1/NITA FITRIANI-FKIK.pdf](http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/33026/1/NITA%20FITRIANI-FKIK.pdf)
- Rini, A. S., & Sugiharti, L. (2016). Determining Factors Of Poverty In Indonesia: Household Analysis. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, 1(2), 80–95. <https://doi.org/10.20473/jiet.v1i2.3252>
- Ristika, E. D., Primandhana, W. P., & Wahed, M. (2021). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur. *Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 12(2), 129. <https://doi.org/10.33087/eksis.v12i2.254>
- Sakinah, N., & Pudjianto, H. (2018). Determinants of Poverty in East Java Metropolitan Area in 2010-2016. *Eko-Regional Jurnal Pengembangan Ekonomi Wilayah*, 13(2), 32–40. <https://doi.org/10.20884/1.erjpe.2018.13.2.1171>

- Sari, Y. A. (2021). Pengaruh Upah Minimum Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah. *Equilibrium : Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 10(2), 121–130. <https://doi.org/10.35906/je001.v10i2.785>
- Wulandari, H., & Aisyah, S. (2021). Analisis determinan kemiskinan di Provinsi Jawa dan Bali. *Journal of Economics Research and Policy Studies*, 1(2), 106–116. <https://doi.org/10.53088/jerps.v1i2.136>